



EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO 4 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya)

Daffa Isytiak Wibisono¹, Radjikan², Muhammad Roisul Basyar³

¹²³ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli 2025

Available online Juli, 2025

daffawibisono21@gmail.com,

radjikan@untag-sby.ac.id,

roisulbasyar@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Studi di Kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya). Penelitian Ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi kebijakan Oleh William N. Dunn dengan indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Hasil penelitian ini membahas Pencegahan Dan peningkatan Kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan; Perumahan Kumuh

ABSTRACT

This research focuses on Surabaya City Regional Regulation No. 4/2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements (Study in Pakis Village, Sawahan Kec. Surabaya City). This research uses descriptive qualitative method with primary data collection and secondary data. Primary data is obtained from observation, interviews, and documentation. While secondary data is taken from journals, books, and other relevant references. This research uses the theory of policy evaluation by William N. Dunn with indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. The results of this study discuss the prevention and quality improvement of housing and slums in the Pakis Village area, Sawahan, Surabaya City.

Keywords: Evaluation; Policy; Slum Housing

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola kepadatan penduduk dan ketersediaan permukiman yang layak. Peningkatan jumlah penduduk, khususnya di wilayah perkotaan, mendorong meningkatnya permintaan terhadap perumahan. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan diartikan sebagai kumpulan rumah yang menjadi bagian dari suatu permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum

*Corresponding author

E-mail addresses: daffawibisono21@gmail.com

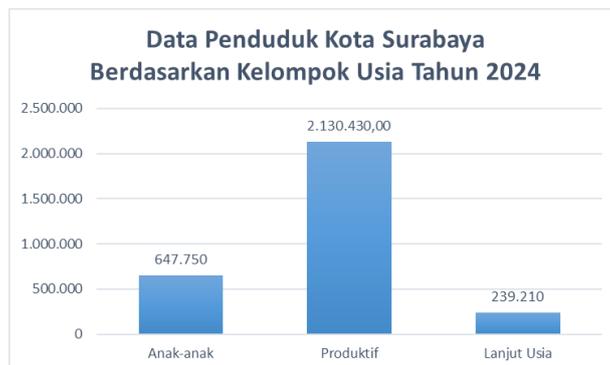


sebagai hasil dari upaya pemenuhan rumah layak huni. Sementara itu, kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian, serta menjadi lokasi kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan perumahan dan permukiman yang layak tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat di kota-kota besar umumnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan alami dan arus urbanisasi yang tinggi akibat migrasi dari wilayah perdesaan ke perkotaan (Soebyakto et al., 2016).

Kepadatan penduduk menyebabkan tingginya persaingan antar penduduk untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik terutama kehidupan yang ada di kota. (Rachman et al., 2023) Kepadatan penduduk juga menjadi faktor munculnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi tantangan baru yang harus dihadapi di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung. Akibat keterbatasan lahan dan tingginya harga properti, masyarakat yang berpenghasilan rendah seringkali terpaksa untuk tinggal di permukiman padat dengan kondisi yang bisa dikatakan tidak standar dalam hal kesehatan dan keamanan. Menurut (Rindarjono, 2012,:65) Permukiman kumuh merupakan pemukiman yang kondisinya bisa disebut tidak layak. Kepadatan bangunan yang tinggi, kebutuhan air bersih yang kurang memadai, sarana jalan yang buruk, serta kelengkapan sarana sosial yang kurang mendukung.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan hunian yang layak, ketimpangan ekonomi, migrasi dari desa ke kota, serta lemahnya penegakan kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan di daerah perkotaan. Pemerintah Indonesia sudah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui berbagai kebijakan, seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), serta peningkatan infrastruktur dasar di kawasan permukiman kumuh. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar hukum dalam penataan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Di Kota Surabaya Permasalahan permukiman kumuh pernah menjadi isu krusial dalam pembangunan perkotaan di Surabaya, Meskipun Kota Surabaya pernah menghadapi permasalahan kawasan permukiman kumuh berat, namun seiring dengan berbagai program penanganan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, saat ini kondisi tersebut telah berhasil diatasi. Berdasarkan data terbaru, kawasan kumuh berat di Surabaya sudah tidak ditemukan lagi, dan yang tersisa hanyalah kawasan dengan kategori kumuh ringan. Sebagai bagian dari wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, berdasarkan data Kota Surabaya sebagai kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia. Dengan luas wilayah 350,5 km² dan jumlah penduduk yang padat pada tahun 2024 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Surabaya

Kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan tata ruang dan permukiman. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keberadaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kualitas hunian, penyediaan infrastruktur, serta penataan lingkungan. Namun, di lapangan, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses, serta resistensi dari masyarakat dalam proses relokasi atau perbaikan kawasan. Dari berbagai wilayah, Surabaya selatan merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan tinggi, hal ini dapat dilihat dari ketidakseimbangan antara luas wilayah dan jumlah kepadatan penduduk yang ada. Kriteria permukiman kumuh di Surabaya umumnya ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak layak huni, kepadatan penduduk yang tinggi, akses terhadap air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, serta ketidakteraturan dalam pembangunan.

Menurut data dari Pemerintah Kota Surabaya, sejumlah wilayah yang masih memiliki kawasan kumuh ringan yang membutuhkan perhatian dalam hal kebijakan. Salah satu yang menjadi kawasan prioritas adalah Kelurahan Pakis, yang menjadi bagian dari studi kasus dalam penelitian ini, disebutkan bahwa Luas permukiman di Kelurahan Pakis, Surabaya adalah 8,28 Ha dan terdapat indikasi di beberapa lokasi masuk dalam kriteria permukiman kumuh ringan.



Sumber: Satu Data Kelurahan

Kelurahan pakis yang terletak di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya memiliki karakteristik hunian yang padat. Pada tahun 2025 jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai 35.374 jiwa dan

*Corresponding author

E-mail addresses: daffawibisono21@gmail.com



kepadatan penduduk 19.039 jiwa. Kepadatan penduduk yang tinggi ini merupakan salah satu indikasi munculnya permukiman kumuh, isu permasalahan yang ada di kelurahan pakis meliputi:

No	Aspek	Permasalahan
1.	Bangunan Gedung	78 unit tidak memiliki keteraturan bangunan, 27 unit tidak memenuhi persyaratan teknis, 39 bangunan tidak memiliki SHM/HGB/surat yang diakui pemerintah
2.	Jalan Lingkungan	Sepanjang 1941 m Jalan eksisting rusak
3.	Drainase lingkungan	Sepanjang 17,2 m tidak tersedia drainase, dan memiliki konstruksi drainase buruk
4.	Persampahan	569 KK tidak memiliki sarana prasarana persampahan yang sesuai standar
5.	Sistem Proteksi Kebakaran	243 unit tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Baseline kawasan Prioritas Kota Surabaya Tahun 2022

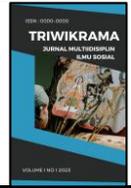
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan strategi pencegahan serta perbaikan kawasan yang telah teridentifikasi sebagai permukiman kumuh. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi, mengingat masih adanya tantangan dalam implementasi di lapangan, termasuk koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program perbaikan permukiman.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2018 di Kelurahan Pakis. Dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan dari William Dunn, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil mengatasi permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Surabaya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut (Taufiqurakhman, 2014) Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan tertentu di dalam masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh pihak pemangku kebijakan atau pemerintahan yang memiliki tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan publik yang terjadi. Berdasarkan pembahasan konsep kebijakan publik diatas, maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik



membahas mengenai publik dan isu-isu ataupun permasalahan publik yang dimana perlu adanya suatu tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan *“tindakan”* dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Evaluasi Kebijakan Publik

(Thomas R. Dye, 1992:354) yang mentakrifkan evaluasi kebijakan sebagai, *“ is learning about the consequences of public policy.”* Definisi ini menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. Dalam konteks ini adalah penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris tentang efek dari kebijakan dari program publik terhadap targetnya dari tujuan yang diinginkannya. Dengan demikian, evaluasi berkenaan dengan tujuan kebijakan meskipun tidak selalu diketahui tujuan-tujuan kebijakan tertentu atau beberapa program yang saling bertentangan tujuannya. Terkait dengan kemungkinan tidak stabilnya tujuan-tujuan kebijakan.

Teori evaluasi kebijakan juga menekankan pentingnya melibatkan beberapa pemangku kepentingan utama (*stakeholder*) dalam proses evaluasi. Pemangku kepentingan, seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah, memiliki perspektif terkait keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi suatu proyek dapat dilakukan dari berbagai perspektif untuk memperoleh gambaran dampak proyek yang lebih komprehensif. Selain itu, evaluasi publik terhadap kebijakan publik sering kali berfokus pada tiga dimensi utama yaitu input, output, dan outcome. Input mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu tugas, output mengacu pada hasil tugas, dan hasil mengacu pada dampak keseluruhan dari tugas tersebut. Proses evaluasi juga mencakup analisis kepatuhan terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik. Evaluasi yang baik mungkin dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi mereka yang bertanggung jawab melakukan reformasi atau penyesuaian yang diperlukan.

Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn

Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai hasil dan dampak suatu kebijakan publik guna mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengenai efektivitas, efisiensi, serta relevansi kebijakan yang dijalankan. Berikut adalah model evaluasi kebijakan berdasarkan pemikiran William Dunn, yang dikenal dengan pendekatan analitis terhadap kebijakan publik:

1. Efektivitas

Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan telah berhasil memecahkan masalah yang hendak diselesaikan atau mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi

Efisiensi ini menilai perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang menghasilkan dampak maksimal



dengan biaya seminimal mungkin.

3. Kecukupan

Kecukupan mengevaluasi apakah solusi yang ditawarkan oleh kebijakan cukup besar atau signifikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat atau kelompok sasaran.

4. Perataan

Aspek ini menilai dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok, dengan fokus pada apakah ada ketidakadilan dalam distribusi manfaat atau beban kebijakan.

5. Responsivitas

Seberapa baik kebijakan tersebut menanggapi kebutuhan, preferensi, atau tuntutan dari masyarakat yang diatur? Evaluasi ini mengukur sejauh mana kebijakan menyesuaikan dengan aspirasi publik dan dinamikanya.

6. Ketepatan

Apakah kebijakan ini sesuai dengan nilai, norma, dan konteks sosial budaya yang ada? Ketepatan berkaitan dengan apakah kebijakan tersebut dianggap layak dan cocok oleh masyarakat serta lembaga terkait

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami situasi, proses, atau pandangan individu maupun kelompok dalam konteks tertentu secara rinci dan terperinci, Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai masalah Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kota Surabaya (Studi Kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surabaya sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksudkan data primer adalah data-data yang didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya dalam penelitian ini yang berhubungan langsung dengan Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kota Surabaya (Studi Kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya), Yaitu Bappedalitbang Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Pada penelitian ini ada beberapa data sekunder yang digunakan, diantaranya dokumen-dokumen dan artikel berita yang berhubungan langsung dengan fenomena yang diambil, jurnal penelitian, data statistik, dan yang lainnya.



Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Adapun beberapa instrumen yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dijelaskan dibawah ini:

1. Wawancara

Menurut pendapat dari (Sugiyono, 2017) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan informan yang dipilih untuk memperoleh informasi yang detail dan mendalam. Pertanyaan dalam wawancara bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan sesuai dengan konteks penelitian.

2. Observasi

(Sutrisno Hadi, 1986) Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap situasi, aktivitas, dan interaksi di Kelurahan Kapasari. Observasi dilakukan untuk memahami konteks secara utuh dan mendokumentasikan data yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data juga dilakukan melalui analisis dokumen, seperti laporan, foto, video, dan catatan lain yang relevan dengan topik penelitian.

Analisi Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam teknik analisis data adalah proses sistematis dalam memperoleh informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Proses ini mencakup berbagai metode, seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau studi dokumentasi, yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer, yang diperoleh langsung dari responden, atau data sekunder, yang diambil dari sumber yang sudah ada, seperti laporan, jurnal, atau dokumen resmi. Pengumpulan data yang baik harus mempertimbangkan validitas dan reliabilitas agar hasil analisis data dapat memberikan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data menurut (Miles & Huberman, 1992) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.



Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadang kala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

3. Penyajian Data

(Miles & Huberman, 1992) membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut (Miles & Huberman, 1992) hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

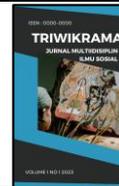
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL dan PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Kota Surabaya No 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh (Studi di Kelurahan Pakis Kec.Sawahan Kota Surabaya).

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator pertama dalam evaluasi kebijakan William n. dunn, dari indikator Efektivitas ini dapat di ketahui sejauh mana tujuan kebijakan ini telah tercapai, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan penelitian di lapangan, pelaksanaan perda kota Surabaya no 4 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (Studi di Kelurahan Pakis Kec.Sawahan kota Surabaya) telah mencapai tujuan yaitu mengurangi kawasan perumahan dan permukiman kumuh di kota Surabaya dan kawasan kelurahan pakis Kec.Sawahan yang menjadi studi dalam penelitian ini. Dengan tercapainya tujuan dari kebijakan kota Surabaya no 4 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas



perumahan dan permukiman kumuh (Studi di kelurahan Pakis Kec.Sawahan kota Surabaya) ini membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh telah mencapai indikator efektivitas sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kebijakan William N. dunn.

Tercapainya indikator efektivitas dari Perda kota Surabaya no 4 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bappedalitbang kota Surabaya yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi perumahan dan permukiman telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik di kawasan kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan indikator kedua dalam evaluasi kebijakan William N. dunn dari indikator Efisiensi dapat diketahui tingkat perbandingan sumber daya dan hasil yang diperoleh dari perda kota Surabaya no 4 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surabaya, Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di kawasan Kelurahan Pakis Kec.sawahan, Perda Kota Surabaya No 4 Tahun 2018 sudah cukup efisien dalam perbandingan sumber daya dan hasil yang diperoleh.

Tercapainya indikator efisiensi pada perda kota Surabaya no 4 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Pakis kec. sawahan kota Surabaya ini dibuktikan dengan data dari bappedalitbang kota Surabaya yang menunjukkan bahwa secara umum di seluruh wilayah kota Surabaya sudah tidak ada lagi wilayah yang masuk dalam kategori kumuh berat.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan indikator ketiga dalam evaluasi kebijakan William N. dunn dari indikator kecukupan dapat diketahui bahwa seberapa jauh suatu kebijakan mampu mengatasi suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam konteks perda kota Surabaya No 4 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Surabaya dapat dinilai kecukupannya dalam mengatasi permasalahan yang ada di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di kawasan Kelurahan Pakis Kec.sawahan kota Surabaya, peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2018 sudah cukup untuk mengatasi permasalahan di kawasan Kelurahan Pakis Kec.Sawahan Kota Surabaya.

Tercapainya indikator kecukupan pada perda kota Surabaya no 4 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Pakis kec. sawahan kota Surabaya ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan sekretaris Kelurahan pakis Kec. sawahan yang mengatakan bahwa indikator kecukupan sudah mampu mengatasi permasalahan yang ada di kota Surabaya, dan di kawasan Kelurahan Pakis Kec. Sawahan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh telah berjalan dengan cukup baik.



4. Perataan

Perataan merupakan indikator keempat dalam evaluasi kebijakan William N. dunn, dari indikator perataan dapat diketahui sejauh mana kebijakan Perda kota Surabaya No. 4 Tahun 2018 memberikan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Pakis Kec. Saawahan kota Surabaya, Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di kawasan Kelurahan Pakis Kec.sawahan kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh indikator perataan masih kurang mampu mengatasi permasalahan mengenai mekanisme pendistribusian bantuan atau perbaikan infrastruktur agar tidak terjadi ketimpangan.

Tidak tercapainya indikator perataan perda kota Surabaya no 4 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Pakis kec. sawahan kota Surabaya ini dibuktikan dengan dengan hasil wawancara dengan informan penelitian yang mengatakan bahwa indikator perataan masih kurang mampu mengatasi permasalahan mengenai mekanisme pendistribusian bantuan atau perbaikan infrastruktur agar tidak terjadi ketimpangan.

5. Responsivitas

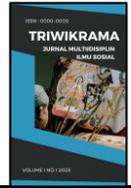
Responsivitas merupakan indikator kelima dalam evaluasi kebijakan William N. dunn, dari indikator Responsivitas dapat diketahui mengenai penyelenggaraan program rehabilitasi infrastruktur dari kebijakan Perda kota Surabaya No. 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh khususnya di kawasan Kelurahan pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di kawasan Kelurahan Pakis Kec.sawahan kota Surabaya, Perda Kota Surabaya No 4 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, masih kurang dalam responsif dalam menanggapi keluhan dari masyarakat.

Tidak tercapainya indikator responsivitas perda kota Surabaya no 4 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Pakis kec. sawahan kota Surabaya ini dibuktikan dengan dengan hasil wawancara dengan informan penelitian yang mengatakan bahwa, mengenai penyelenggaraan program rehabilitasi infrastruktur masih kurang untuk responnya.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan indikator terakhir dalam dalam evaluasi kebijakan William N. dunn, dari indikator ketepatan dapat diketahui sejauh mana kebijakan Perda kota Surabaya No. 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai dengan akar permasalahan dan dampak kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga, khususnya yang ada di kelurahan Pakis kec. Sawahan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di kawasan Kelurahan Pakis Kec.sawahan kota Surabaya, Perda Kota Surabaya No 4 Tahun 2018 terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Telah sesuai dengan akar permasalahan dan dampak kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga.

Tercapainya indikator ketepatan kebijakan kota Surabaya no 4 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Pakis kec. sawahan kota Surabaya ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan penelitian yang mengatakan bahwa, kebijakan tersebut telah



sesuai dengan akar permasalahan dan dampak kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga, khususnya yang ada di kelurahan Pakis kec. Sawahan Kota Surabaya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Evaluasi Peraturan daerah kota Surabaya no 4 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh (studi kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya) ini, terdapat beberapa indikator dari teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang telah tercapai, Indikator evaluasi kebijakan yang telah tercapai yaitu Efektivitas Tercapainya indikator efektivitas ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bappedalitbang kota Surabaya yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi perumahan dan permukiman telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik di kawasan kelurahan Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya. Efisiensi tercapainya indikator efisiensi dibuktikan dengan adanya data dari bappedalitbang dan hasil wawancara dari Kelurahan Pakis Kec. Sawahan yang menunjukkan bahwa secara umum di seluruh wilayah kota Surabaya sudah tidak ada lagi wilayah yang masuk dalam kategori kumuh berat. Kecukupan tercapainya indikator ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bappedalitbang kota Surabaya dan sekretaris Kelurahan pakis Kec. sawahan yang mengatakan bahwa indikator kecukupan sudah mampu mengatasi permasalahan yang ada di kota Surabaya, dan di kawasan Kelurahan Pakis Kec. Sawahan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh telah berjalan dengan cukup baik. Ketepatan, tercapainya indikator ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan penelitian yang mengatakan bahwa, kebijakan tersebut telah sesuai dengan akar permasalahan dan dampak kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga, khususnya yang ada di kelurahan Pakis kec. Sawahan Kota Surabaya.

Saran

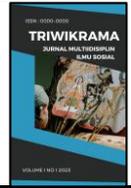
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018, ditemukan bahwa meskipun telah terdapat upaya konkret dari pemerintah kota dalam menangani perumahan dan permukiman kumuh, masih terdapat kekurangan dalam aspek pemerataan dan responsivitas. Kedua indikator ini merupakan bagian penting dari evaluasi menurut William N. Dunn, yang menekankan pentingnya keadilan distribusi bantuan atau perbaikan infrastruktur serta kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

1. Pemerataan

Pemerintah kota perlu melakukan pemetaan ulang secara menyeluruh terhadap kawasan kumuh ringan dengan pendekatan berbasis data spasial dan partisipatif, perlu juga Meningkatkan akses informasi dan pelibatan warga di wilayah kurang terlayani, agar masyarakat dapat mengusulkan kebutuhan perbaikan lingkungan secara aktif.

2. Responsivitas

Perlu menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penanganan aduan warga terkait kawasan prioritas, seperti batas waktu respon, proses verifikasi, dan tindak lanjut, agar tercipta akuntabilitas dalam pelaksanaan Perda.



Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengaduan dan realisasi tindak lanjutnya, khususnya di wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan yang sulit mendapatkan akses, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kebijakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A., & Murtiadi, S. (2022). *EVALUATION AND IMPLEMENTATION STRATEGY OF SLUM HANDLING CASE STUDY LOMBOK DISTRICT EAST*. 2(4), 2033-2044.
- Andi Lestari, S. (2021). *Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)*. 2021, 1-23.
- Anisa Noviliyani. (2023). *EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGATASI PEMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN TAMAN GUMELEM KELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG*. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104-116.
- Iloerika-Okafor, A. C, Okoye, C. O. , Onuoha, D. C. (2024). *Evaluation of the Impact of Slum Environment on Residents of Ajegunle Slum*. 10(3), 222-241. <https://doi.org/10.56201/ijgem.v10.no3.2024.pg222.241>
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Rahmani, M. R., Arifin, J., & Rijali, S. (2020). Implimentasi program kotaku (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi pemukiman kumuh di kelurahan agung kecamatan tanjung kabupaten tabalong. *JAPB*. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/248>
- Rangkuti, N. A., Nuraini, C., Millanie, F., & Sugiarto, A. (2023). Strategi Tata Kelola Penanganan Pemukiman Kumuh Di Kota Tebing Tinggi. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1426-1432. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1082>
- Ridwan, R., Rusli, B., Saefullah, A. D., & Nurasa, H. (2019). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Cilegon. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 225-238. <https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6790>
- Soebyakto, B. B., Sukmaniar, & Saputra, W. (2016). Actualization Social Migration and Intensity of Education: A Case Study in Developed and Developing Countries. *Proceeding Sriwijaya Economic and Businmess Conference*, 692-698.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D* (M. Dr.Ir.Sutopo.S.Pd (ed.)). ALFABETA.
- Sundari Siti, M. L. (2020). *EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS*. 2507(February), 1-9.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negarakepada Presidenselaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama(Pers).
- Thomas R. Dye. (1992). *Understanding Public Policy* (7 Th Ed). Prentice Hall.
- Utary Ayu Tamara, & Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak. (2024). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 151-162. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.162>